

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah dalam sebuah kabupaten memiliki otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), 2 sumber daya alam (air, tanah, hutan) dan sumber daya lainnya. Salah satu hal yang dapat membangun sumber daya ekonomi dan masyarakat desa adalah dengan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). (Bahruddin et al., 2022)

Pengelolaan keuangan BUMDes menunjukkan jumlah dan kualitas pengelola, yang menunjukkan perkembangan BUMDes. Tugas pengelola BUMDes menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang baik karena mereka berkomitmen untuk menjaga anggaran desa, termasuk pelaporan keuangan.. (Amelia et al., 2024).

Pengelolaan keuangan adalah aspek yang sangat penting dari kesuksesan bisnis karena akan tercermin dalam kebangkrutan BUMDes. Layanan pengelolaan keuangan BUMDes terdiri dari perencanaan, pencatatan pertanggungjawaban dan pengawasan. Gunanda (2020) menyatakan bahwa BUMDes yang memiliki rencana

keuangan yang baik akan memiliki kemampuan untuk berkembang dan menjadi perusahaan yang lebih besar. Pada akhirnya, laporan keuangan ini juga akan berfungsi sebagai alat bagi karyawan BUMDes untuk melacak kemajuan mereka.

Penyusunan laporan keuangan, bumdes harus mematuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya; dengan kata lain, dalam hal ini, bumdes harus mematuhi pedoman standar, yaitu SAK ETAP. Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015, Untuk menganalisis laporan keuangan BUMDes, dapat memanfaatkan SAK ETAP,. Tujuan penggunaan SAK ETAP adalah untuk memastikan bahwa data keuangan BUMDes dapat dipahami, relevan, andal, dan tersaji secara komprehensif.(Ishak & Syam, 2020). pelaporan keuangan SAK ETAP dapat menjadi rekomendasi pengambilan keputusan dalam menjalankan usahayang lebih intensif dikemudian hari(Arodhiskara et al., 2022)

BUMDes, yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang bertanggung jawab dibentuk oleh kabupaten dan/atau bekerja sama dengan kabupaten untuk mendukung usaha, memanfaatkan sumber daya, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, dan memenuhi kebutuhan orang lain di desa. BUMDes serta berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi di kecamatan dan berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai entitas sosial,

BUMDes melayani kebutuhan masyarakat umum dengan berkontribusi dalam penyediaan layanan sosial. Di sisi lain, sebagai organisasi komersial, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang dan jasa lokal di pasar.(F. Syukri & Arodhiskara, 2024)

Ketika BUMDes dioptimalkan dan dikombinasikan dengan peningkatan pengelolaan keuangan, kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Dengan menerapkan empat tahap pengelolaan keuangan-perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan-dengan benar dan dengan pengawasan yang memadai, pengelolaan keuangan diperkuat. BUMDes didirikan dengan harapan dapat membantu mengelola potensi desa dan sumber daya ekonomi lainnya serta mendorong pemberdayaan masyarakat.(Ladung & Syukri, 2022)

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab BUMDes tidak dapat berjalan secara optimal sehingga dikategorikan belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), seperti minimnya inovasi dalam mengelola produk bagi BUMDes yang memiliki unit usaha dibidang produksi sehingga tidak mampu bersaing dipasaran, demikian pula terhadap kemampuan untuk menggali potensi lokal desa dan kemampuan perencanaan bisnis dari pengelola BUMDes yang tergolong masih kurang (Indriani & Arham, 2024)

Digitalisasi adalah salah satu elemen yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Teknologi digital adalah pergeseran dari operasional yang memerlukan lebih sedikit tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian komputer yang serba otomatis. Kehadiran berbagai alat komunikasi kontemporer yang memungkinkan setiap orang mengolah, membuat, mengirimkan, dan menerima pesan komunikasi di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tidak ada batasan ruang dan waktu, adalah tanda berkembangnya teknologi digital. (Purnama, 2022).

BUMDes harus mengikuti era digitalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Digitalisasi juga meningkatkan komunikasi antara manajer dan lingkungan eksternal, yang mengubah praktik eksternal (Supriyanta & Fifaldyovan, 2023). Laporan keuangan digital dapat digunakan, yang memungkinkan pengelola BUMDes mengakses data dan informasi yang telah disusun dengan baik.

Digitalisasi telah memainkan peran penting dalam mengubah cara BUMDes bekerja. BUMDes telah dapat meningkatkan pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pemantauan kinerja berkat penggunaan sistem informasi. Sistem informasi berbasis digital adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen BUMDes dan meningkatkan produktivitas operasi mereka. (Wulandari et al., 2024)

Desa Kaballangan merupakan salah-satu desa yang telah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) yang terletak dikecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang didirikan pada tahun 2018 adapun jenis usaha yang dimiliki oleh BUMDes mandala yaitu Kebun desa, Toko desa dan Pertamina. Dari hasil awal peneliti menunjukkan bahwa pengurus BUMDes menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya perhatian pengurus BUMDes terhadap penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dasar akuntansi di kalangan pengurus. Keterbatasan ini menjadi penghalang dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Padahal, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan pengembangan BUMDes.

Selain itu, BUMDes Mandala juga menghadapi masalah terkait sumber daya manusia (SDM). Perekrutan karyawan yang dekat dengan perangkat desa dan pengurus BUMDes menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas pengelolaan BUMDes secara keseluruhan.

Di era digital ini, BUMDes Mandala juga perlu beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangannya. Namun, pengurus BUMDes belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Padahal, digitalisasi dapat membantu

BUMDes dalam mengakses data dan informasi yang telah disusun dengan baik, serta meningkatkan komunikasi dengan lingkungan eksternal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, BUMDes Mandala perlu menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang tepat di era digital. Hal ini meliputi peningkatan kompetensi pengurus BUMDes dalam bidang akuntansi dan keuangan, pemanfaatan teknologi digital dalam penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian di BUMDes Mandala Kaballangan Kabupaten Pinrang , dengan judul “**Strategi Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Era Digital (Studi Kasus Bumdes Mandala desa Kaballangan kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)**”

B. Fokus Penelitian

Pengelolaan BUMDes yang belum profesional dan memiliki kompetensi untuk mengurus keuangan BUMDes di era digital. Pengelolaan Keuangan BUMDes dalam pemanfaatan teknologi digital tentunya harus dijalankan oleh orang yang profesional dalam bidang keuangan, sehingga pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi pengelolaan keuangan BUMDes Mandala di Era digital ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan fokusnya, adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh BUMDes Mandala di Desa Kaballangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan bidang ilmu pengetahuan , khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan di tingkat desa.
- b. penelitian ini Menghasilkan model-model teoritis tentang pengelolaan keuangan Bumdes yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya
- c. Menyediakan sumber referensi yang berguna bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam studi tentang Bumdes dan digitalisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini Membantu meningkatkan kapasitas pengelola Bumdes dalam mengambil keputusan finansial yang lebih baik melalui analisis data.

- b. Hasil penelitian Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan keuangan Bumdes.
- c. Memberikan panduan bagi pengambil keputusan di tingkat desa untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan BUMDes secara lebih efisien dan transparan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Bumdes

a. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah suatu proses yang penting dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi penggunaan sumber daya keuangan baik untuk individu maupun organisasi. Pengelolaan keuangan merupakan implementasi good governance dalam tata kelola suatu organisasi yang dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan suatu organisasi. (Puspitasari et al., 2022)

Sofyan (2015) menjelaskan bahwa dalam pengelolaannya harus dijalankan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan. Di BUMDes, langkah-langkah pengelolaan keuangan dimulai dengan perencanaan. Perencanaan adalah tahapan penyusunan program kerja dalam satu bulan atau tahun anggaran dasar (sustainability), dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara professional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan

informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. (Siagian, 2021)

Di BUMDes, langkah-langkah pengelolaan keuangan dimulai dengan perencanaan. Perencanaan adalah tahapan penyusunan program kerja dalam satu bulan atau satu tahun anggaran dasar dan rumah tangga melalui musyawarah desa. BUMDes menyusun program kerja dan anggaran yang diperlukan untuk periode tertentu, yang biasanya dilakukan satu bulan atau satu tahun, dengan melalui musyawarah desa.

Tahap pelaksanaan adanya pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan bisnis sesuai anggaran yang telah disetujui. Pada tahap penatausahaan, pencatatan dilakukan secara sistematis sesuai prinsip, standar, dan prosedur yang berlaku. Tahap pelaporan meliputi penyusunan laporan keuangan bulanan untuk unit bisnis. Terakhir, tahap pertanggung jawaban adalah bentuk pertanggung jawaban atas laporan keuangan unit bisnis, laporan konsolidasi unit, dan pencapaian BUMDes yang disampaikan melalui musyawarah desa kepada pihak yang berkepentingan. (Ardiyansyah et al., 2022)

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa (Suryo Wibowo et al., 2022). Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Tenda et al., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani (2019) menjelaskan pengertian BUMDes yaitu “suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa” (Novita Riyanti et al., 2021)

Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melibatkan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Proses ini dirancang untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. yang tersedia. Seyadi (2013) menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang baik sangat krusial bagi semua aktivitas BUMDes, karena dapat memaksimalkan program yang dijalankan serta mendukung kelancaran operasional, sehingga meningkatkan manfaat dari pengelolaan BUMDes itu sendiri. (Iriani et al., 2022)

Pemerintah daerah membentuk BUMDes. Masalah atau kekhawatiran terkait Pengelolaan Pemerintah Desa tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BUMDes. Ini karena fakta bahwa sebagian besar dana yang digunakan oleh BUMDes berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes). (Rika Widianita, 2023)

Undang-undang dikenal sebagai Pedoman untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 mengatur pengelolaan keuangan BUMDes. Ini menyatakan bahwa berikut adalah ketentuan-ketentuan dari pedoman BUMDes:

- 1) Dana desa dapat digunakan untuk modal BUMDes dan kontribusi masyarakat desa. Partisipasi keuangan dari desa dapat diperoleh melalui (APBDes), yang mencakup sumber dana dan item selain tanah dan bangunan. Di sisi lain, partisipasi

modal dari masyarakat desa berasal dari organisasi hukum yang tidak termasuk dalam sumber hukum, serta individu atau kelompok dari desa tersebut, yang menyediakan sumber dana dan barang, termasuk tanah dan bangunan.

- 2) Sebelum dipresentasikan di Musyawarah Desa, catatan-catatan kegiatan operasional akan dikumpulkan dan dilaksanakan oleh Penasihat dan Pengawas. Beberapa laporan yang harus dibuat antara lain Laporan Aktivitas/Diskresi Laporan Semester, Laporan Tahunan, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BUMDes, Laporan Keuangan, dan Laporan Rencana Program Kerja ini merupakan komponen penting dari kegiatan operasional.

- 3) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban BUMDes adalah catatan tentang kegiatan operasional yang disusun setelah dijelaskan oleh Penasihat dan Pengawas dan dipresentasikan dalam Musyawarah Desa. Laporan ini mencakup :

- a) Laporan AD/ART beserta penjelasannya.
- b) Pelaksanaan operasional yang diperlukan untuk memastikan semua rencana program kerja BUMDes terlaksana dengan baik.
- c) Laporan semester yang disampaikan kepada pengamat dan laporan tahunan yang dipresentasikan di Musyawarah Desa.

- d) Laporan semester yang paling signifikan menyoroti aspek keuangan, laba rugi, serta masalah BUMDes yang berulang selama satu semester yang mengganggu operasinya.
 - e) Laporan tahunan setidaknya mencakup informasi tentang keadaan dan operasi BUMDes, serta laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi akhir tahun. Ini juga mencakup rincian masalah yang terjadi selama tahun buku dan laporan tentang tugas pengelolaan sesuai dengan struktur organisasi BUMDes.
 - f) Dalam Musyawarah Desa, Penasihat dan Pengawas akan meneliti dan menyampaikan laporan keuangan.
 - g) Melakukan pembaruan.
 - h) Membayar pajak dan sanksi sesuai dengan persyaratan yang relevan dalam hukum.
- 4) Pengawasan

Pengawas memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pengawasan. Ada beberapa tugas yang dapat dilakukan oleh pengawas, termasuk:

- a) memastikan bahwa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan musyawarah, dan Anggaran Dasar.

- b) Melakukan audit penyelidikan atas laporan keuangan BUMDes jika terbukti ada kesalahan pengelolaan BUMDes. Dengan perintah musyawarah desa, audit keuangan dapat diperiksa dengan memilih dan mendapatkan bantuan auditor independen.
- c) Saat menyampaikan laporan tahunan hasil pemeriksaan atau pengawasan

Sujarweni (2020) menyatakan bahwa BUMDes harus dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan bertahan lama. Proses ini harus dilaksanakan secara profesional dan mandiri dengan mekanisme berbasis anggota dan bantuan diri. Akibatnya, pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan mengikuti enam prinsip berikut:

- 1) Kooperatif: Setiap anggota BUMDes harus mampu bekerja sama dengan baik untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.
- 2) Partisipatif: Setiap individu yang berpartisipasi dalam BUMDes harus bersedia berkontribusi dan mendukung secara sukarela atas permintaan untuk kemajuan BUMDes.
- 3) Emansipatif: Setiap anggota BUMDes harus diperlakukan setara dan tidak melihat perbedaan agama, suku, atau golongan.

- 4) **Transparan:** Setiap kegiatan yang berdampak pada Kepentingan masyarakat umum harus mudah ditemukan dan dipahami.
- 5) **Akuntabel:** Bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan. baik secara administratif maupun teknis.
- 6) **Sustainable:** Usaha yang ramah lingkungan dapat dibuat dan dilestarikan oleh masyarakat melalui BUMDes.

2. Era Digital

a. Definisi Era Digital

Era digital adalah fenomena kehidupan modern yang sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan individu maupun institusi. Dalam banyak aspek, era digital ini memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia saat ini (Andiny, 2023)

Era digital ditandai oleh kemajuan yang merambah ke berbagai aspek kehidupan, mengubah hampir semua hal menjadi format digital. Perkembangan ini terus berlanjut dan tidak dapat dihentikan. Saat ini, belum ada definisi yang konsensus mengenai era digital di kalangan para ahli, karena perkembangannya berjalan seiring dengan tuntutan zaman. Secara umum, era digital menggambarkan kondisi di mana setiap aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih sederhana berkat kemajuan teknologi. Era ini juga hadir

untuk menggantikan berbagai teknologi masa lalu dengan solusi yang lebih modern(Adolph, 2020)

pengelolaan keuangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menghadapi tantangan dan peluang baru. Untuk memahami bagaimana BUMDes dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangannya, penting untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan.

- 1) Infrastruktur Teknologi ini mencakup penilaian terhadap ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi yang digunakan oleh BUMDes. Hal ini meliputi perangkat keras seperti komputer, perangkat mobile, dan jaringan internet yang memadai. Infrastruktur yang baik memungkinkan BUMDes untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan secara efisien.
- 2) Penggunaan Aplikasi Keuangan : ini mengukur tingkat adopsi dan penggunaan aplikasi digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Ini mencakup aplikasi yang digunakan untuk manajemen kas, laporan keuangan, dan analisis data. Semakin tinggi tingkat penggunaan aplikasi ini, semakin efektif pengelolaan keuangan BUMDes di era digital.
- 3) Pelatihan Digital : mencakup jumlah dan jenis pelatihan yang diberikan kepada pengelola BUMDes terkait teknologi

digital. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola dalam menggunakan teknologi untuk pengelolaan keuangan, sehingga dapat memaksimalkan potensi digitalisasi

a. Transformasi digital dalam konteks pengelolaan keuangan BUMDes

Digitalisasi merujuk pada mengubah proses dan layanan bisnis konvensional menjadi lebih efektif, berbasis teknologi, dan terintegrasi. Di dalam situasi ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi berarti penerapan Digitalisasi BUMDes memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan memiliki dampak sosial ekonomi yang lebih besar di tingkat lokal.. Ini dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan pemasaran produk, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada komunitas desa.(Sinarwat et al., 2023).

Shrivastava (2017), digitalisasi adalah proses yang mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, melaksanakan tugas, dan model bisnis menjadi lebih berbasis digital. Tujuan dari digitalisasi adalah untuk menekan biaya dengan mengoptimalkan proses internal. Sementara itu, Ritter dan Pedersen (2020) mengemukakan bahwa digitalisasi merujuk pada peningkatan ketersediaan

data digital yang terjadi berkat kemajuan dalam produksi, transfer, penyimpanan, dan analisis data digital.(Herlina, 2023)

Salah satu langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas adalah dengan mendigitalisasi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam konteks ini, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menjadi sangat penting. SIA berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data keuangan serta menghasilkan laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Akuntansi memungkinkan BUMDes beralih dari metode pencatatan manual ke sistem digital yang lebih terintegrasi. Dengan memanfaatkan aplikasi SIA yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BUMDes dapat melakukan pencatatan transaksi secara otomatis dan sistematis. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan manusia, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian oleh Wardani (2022) menunjukkan bahwa penerapan SIA di BUMDes menghasilkan transparansi pengelolaan keuangan yang lebih baik, meskipun masih ada beberapa masalah, seperti

kekurangan pelatihan dan infrastruktur teknologi yang cukup.
(Ratnaningsih, 2021)

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh digitalisasi melalui SIA, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang mahir dalam penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu hambatan utama. Banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menggunakan sistem informasi secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pengelola dapat memanfaatkan teknologi dengan baik (Sari et al., 2024).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Strategi pengelolaan keuangan BUMDes di Era digital, yakni :

1. Muhammad Nur, Roni Hakim, dan Hariadi (2023) melakukan penelitian tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Sipakamase Pincara, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa empat aspek pengelolaan BUMDes Sipakamase Pincara, yaitu pengelolaan kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan

pengelolaan usaha, dilakukan dengan baik, tetapi ada kekurangan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

2. Ni Kadek Sinarwati , EdySujana², Ni Ketut Kertiasih dan Ihfadna Al Insani (2023) dengan penelitian tentang digitalisasi bisnis desa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil. Penelitian kualitatif deskriptif ini menguji kemampuan prototype SAKU (Sistem Analisis Kelayakan Usaha) BUMDes Berbasis Android untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Hasil validasi menunjukkan bahwa 75% prototype dapat menyajikan data yang diperlukan BUMDes untuk membantu mereka membuat analisis kelayakan usaha, dan 70% pengguna mengatakan bahwa prototype ini membantu mengembangkan bisnis BUMDes. SAKU adalah cara untuk digitalisasi BUMDes dalam kegiatan usaha dan mendukung pertumbuhan ekomi desa yang merata.
3. Fathor rahman, anisa cindy wijaya, nurfadilah amin, hendriyansyah, feriyanto, isthikmalia, santi antika, indah kirana (2024) dengan penelitian tentang analisis laporan keuangan, kualitas sdm, dan peran digital marketing pada sustainability umkm kerupuk fatmawati kecamatan gapura di kabupaten sumenep. Metode yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan sdm, dan

menilai efektivitas strategi digital marketing yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun umkm kerupuk fatmawati memiliki potensi besar untuk berkembang, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan. Analisis laporan keuangan mengungkapkan perlunya pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Kualitas sdm perlu ditingkatkan melalui proses rekrutmen yang lebih selektif, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penghargaan yang memadai.

4. Sari, Lutfia, dan Soemarsono (2024) berjudul "Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Era Digital Melalui Manajemen SDM. Penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi laporan keuangan untuk meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Dengan demikian, penerapan sistem digital dalam pencatatan keuangan menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyederhanakan proses tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
5. Adella Vian dan Rifai Al Imunur (2023) dengan penelitian tentang strategi pengembangan bumdesa yang kompetitif di era digitalisasi dengan teknologi informasi. Ceramah, simulasi, dan tanya jawab digunakan. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kemajuan

teknologi. Setelah kegiatan selesai, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mengelola usahanya.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Fikiir

Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang mencakup perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Proses dimulai dengan perencanaan yang matang untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang membantu BUMDes mengidentifikasi sumber daya dan menetapkan tujuan yang realistis. Selanjutnya, pencatatan setiap transaksi keuangan secara akurat memastikan bahwa arus kas dapat dipantau dengan baik, sehingga

penggunaan dana sesuai dengan rencana. Pertanggungjawaban menjadi tahap krusial di mana laporan keuangan disusun untuk menunjukkan transparansi penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah desa. Terakhir, pengawasan melibatkan masyarakat dalam memantau pengelolaan keuangan, meningkatkan akuntabilitas BUMDes. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, BUMDes dapat berfungsi sebagai lembaga yang efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di era digital, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan melalui sistem yang lebih efisien dan transparan. Perencanaan dalam BUMDes kini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang memungkinkan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lebih akurat dan terstruktur, sehingga pengurus dapat menentukan prioritas penggunaan dana dengan lebih baik. Selanjutnya, pencatatan transaksi keuangan yang sebelumnya dikerjakan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis melalui software akuntansi, yang tidak hanya mengurangi risiko kesalahan manusia tetapi juga mempercepat proses pencatatan. Dalam konteks pertanggungjawaban, laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem digital dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola BUMDes. Terakhir, pengawasan menjadi lebih efektif karena data keuangan yang terintegrasi

memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan monitoring secara real-time, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mengubah cara BUMDes mengelola keuangannya tetapi juga memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa dalam menghadapi tantangan zaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik pengelolaan keuangan di BUMDes era Digital. Metode Studi Kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. (Handayani, 2020)

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BUMDes Mandala desa kaballangan kecamatan duampanua kabupaten Pinrang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai bulan November sampai bulan Januari 2024.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2010). Narasumber dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi dengan akurat.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Ketua BUMDes	Ketua BUMDes Memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola operasional BUMDes, termasuk pengambilan keputusan finansial harian dan bulanan. Informasi dari ketua pengelola dapat menyoroti praktik-praktik pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam era digital
2	Sekretaris Bumdes	Sekretaris BUMDes Bertanggung jawab atas administrasi umum dan dokumentasi internal BUMDes. Sekretaris dapat memberikan detail tentang proses pengumpulan data, penyimpanan dokumen, dan kontrol keuangan yang transparan, yang sangat penting dalam era digital untuk memastikan integritas dan akurasi data

3	Bendahara BUMDes	Bendahara merupakan pihak yang paling memahami pengelolaan keuangan BUMDes secara langsung. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis yang mendalam tentang prosedur dan teknik pengelolaan keuangan. Selain itu, bendahara juga memiliki akses langsung ke data keuangan BUMDes, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini.
4	Masyarakat (Pengawas BUMDes)	Masyarakat merupakan sumber informasi yang paling relevan dan akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di desa. Mereka memiliki pengetahuan langsung tentang bagaimana BUMDes beroperasi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
5	Masyarakat (Pengelola BUMDes)	Masyarakat yang mengelola BUMDes memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan usaha dan keuangan desa. Mereka dapat memberikan informasi yang akurat mengenai praktik, tantangan, dan keberhasilan yang dialami dalam operasional BUMDes. Informasi ini sangat berharga untuk memahami dampak BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat desa

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Defenisi Operasional Menurut Sugiyono (2020), penentuan konstruk atau karakteristik yang akan diteliti sehingga dapat menjadi variabel yang dapat diukur (Haliza, 2023), berdasarkan

maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Pengelolaan keuangan BUMDes

Pengelolaan keuangan BUMDes merupakan proses yang meliputi perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan. Proses ini mencakup:

- a) Perencanaan: Menyusun anggaran yang mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran.
- b) Pencatatan: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disusun.
- c) Pertanggungjawaban: Menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan SAK ETAP.
- d) Pengawasan: Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2. Era Digital

Era digital adalah suatu zaman yang telah mengalami kemajuan di semua aspek kehidupan, mengubah hampir segala sesuatu menjadi bentuk digital. Dalam era digital yang terus berkembang, pengelolaan keuangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menghadapi tantangan dan peluang baru. Untuk

memahami bagaimana BUMDes dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangannya, penting untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan seperti ,Infrastruktur Teknologi, Penggunaan Aplikasi Keuangan dan Pelatihan Digital.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari objek melalui pengamatan lokasi. Keterangan dan data dari pegawai umum serta orang-orang yang diteliti dan diwawancarai dalam penelitian adalah contoh sumber data primer dari pengamatan lokasi.(Lelisa Army et al., 2023)

- a) Wawancara dan survei langsung dengan pengelola dan anggota BUMDes Mandala.
- b) Observasi langsung di lokasi untuk mengamati praktik pengelolaan yang diterapkan.

2. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian disebut data sekunder. Data ini dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai cara, baik secara komersial maupun nonkomersial.(Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023)

- a) Dokumen internal BUMDes seperti laporan keuangan, catatan kegiatan, dan kebijakan manajemen.
- b) Literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengelolaan keuangan di BUMDes di Era digital

F. Teknik Pengumpulan data

Proses Pengumpulan data yang akan diteliti disebut sebagai "teknik pengumpulan data"; dengan kata lain, metode ini memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan strategis untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan..(Nashrullah et al., 2023)

Penelitian ini mengumpulkan data melalui:

1. Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut melalui wawancara terbuka di mana peneliti hanya menggunakan pedoman garis besar daripada pedoman wawancara yang lengkap dan sistematis untuk pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

2. Observasi (Pengamatan)

teknik observasi melibatkan pengamatan dan catatan fenomena yang terlihat pada subjek penelitian. Pengamatan

objek penelitian secara langsung dan tidak langsung adalah cara pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi menggunakan formulir pencatatan dokumen sebagai alat pengumpulan data; sumber data berupa dokumen atau catatan yang dapat diakses. termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes Mandala di Desa Kaballangan, Kabupaten Pinrang.

4. Browsing Internet

Media internet dimanfaatkan untuk mendukung dan memperoleh informasi dalam bentuk data sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif, menurut Abdussamad (2022), melibatkan penguraian yang akurat terhadap fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai dengan interpretasi terhadap makna yang terkandung di balik apa yang terlihat (interpretatif). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti secara menyeluruh, faktual, dan akurat. Analisis dilakukan setelah informasi yang diinginkan terkumpul, dan berikutnya dievaluasi sesuai

metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2018), yang menguraikan sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi data. Pada tahap ini, seluruh data mentah yang terkumpul diproses untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang paling relevan dan signifikan dengan pertanyaan penelitian. Proses reduksi data ini melibatkan beberapa langkah:

- a) Transkripsi dan Ringkasan: Data wawancara yang direkam ditranskripsi secara verbatim, kemudian dibuat ringkasan yang mencakup poin-poin kunci yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes
- b) Seleksi Data: Data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian disisihkan, sementara data yang relevan dikelompokkan berdasarkan kode yang telah diberikan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui deskripsi naratif. Data yang telah

diringkas disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan strategi pengelolaan keuangan BUMDes Mandala, tantangan yang dihadapi, dan potensi yang ada dalam konteks digitalisasi. Untuk memperkuat argumen dan memberikan ilustrasi konkret, kutipan-kutipan langsung dari wawancara dengan informan juga disertakan dalam narasi.

Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, tahapan krusial berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Tahapan ini menjadi puncak dari analisis data, di mana peneliti berusaha mengungkap makna yang terkandung dalam data dan merumuskan kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara cermat dan sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang muncul dari data.

Pertama, dilakukan interpretasi data secara mendalam. Data yang telah disajikan dalam bentuk narasi dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang menonjol, tema-tema yang dominan, dan hubungan-hubungan yang

signifikan. Interpretasi ini dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi BUMDes Mandala.

Selanjutnya, dilakukan perbandingan dengan teori. Temuan-temuan penelitian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan mengenai pengelolaan keuangan, BUMDes, dan digitalisasi. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan bahkan kontradiksi antara temuan empiris dengan konsep-konsep teoritis yang ada. Hal ini membantu peneliti untuk memperkuat validitas kesimpulan dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori.

Terakhir, untuk memastikan keabsahan dan keandalan kesimpulan, dilakukan triangulasi data. Data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) dibandingkan dan dikonfirmasi satu sama lain. Jika terdapat inkonsistensi atau perbedaan, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mencari penjelasan yang memadai..

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kaballangan

Desa Kaballang yang kita ketahui sekarang memiliki dasar yang berkaitan dengan sebuah sejarah yang disebut "*Barang Tompo*," Dalam bahasa Bugis, itu berarti seekor kerbau jantan berwarna putih dengan mata putih, istilah untuk mata putih adalah "*Ballang Mata*." Karena pengaruh bahasa lokal dan untuk mempermudah penyebutan, nama tersebut kemudian berubah menjadi "*Laballang*"

Seiring waktu, melalui pengaruh informasi dan dialek setempat, sebutan ini berevolusi menjadi "*KABALLANGANG*." Dari segi etimologi, nama ini mengandung arti khusus, seperti "*BALLANG MATA*", yang berarti mata yang jernih dalam bahasa Indonesia, dan "*PENGLIHATAN SUCI*".

Dilain Sumbang tersebut juga nama "*KABALLANGANG* " Berasal dari sebuah cerita, bahwa berapa puluh tahun yang lalu ada seorang kepala yang tinggal di cempa dan kemudian pindah ke *Mallang Toa*. Keberadaannya waktu di cempa " Sang Kepala " Tersebut memiliki kebun yang luasnya 0,70 hektar, yang di dalam kebun itu terdapat sekitar 0,1 hektar yang tidak bisa ditumbuhi pepohonan maupun rerumputan sehingga dikatakan

“*BALLANG*” yang artinya belang. Dari perpaduan dua cerita tadi dapat disimpulkan bahwa nama kaballangang Berasal dari kata *BALLANG* yang artinya “Belang”.

Pada tahun 1952, sistem pemerintahan masih terdiri dari beberapa distrik kaballangang Sendiri, yang terletak di Jalan Poros Pinrang Polman, yang berjarak \pm 19 km dari kota Pinrang. Kaballangang masih merupakan perkampungan kecil yang termasuk dalam distrik paria. Dengan perkembangan ini, sistem pemerintahan mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1100 Tahun 1961, yang menetapkan pembubaran listrik lama dan pembentangan benteng.

Desa kaballangang Dahulunya adalah sebuah daerah yang sangat luas sebelum dimekarkan menjadi tiga desa melalui Surat Keputusan Desa Kabalangang nomor : 5 Tahun 1992 tentang pemekaran desa Kaballangang sebagai berikut :

1. Desa Kaballangang (Desa Induk)
2. Desa Massewae (Desa Pecahan)
3. Desa Katomporang (Desa Pecahan)

B. Visi dan Misi Desa Kaballangan

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat KABALLANGANG Yang Sejahtera dan Mandiri "

b. Misi

- a. Meningkatkan Hasil Pertanian dan Perkebunan Rakyat.
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM Disegala Bidang).
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi.
- d. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Home Industri, DSB).
- e. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Kesehatan, Birokrasi, Pendidikan, DLL).
- f. Meningkatkan Peran Masyarakat Secara Parsitipatif Dalam Pembangunan.

C. Struktur Pemerintahan Desa Kaballangan



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Desa Kaballangan

D. Perkembangan BUMDes Mandala Desa Kaballangan

Awal Mula terbentuknya BUMDes Mandala Desa Kaballangan kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yakni sekitar tahun 2017, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal dan pemberdayaan ekonomi.

BUMDes Mandala memulai operasional dengan tiga jenis usaha: Perikanan atau Perkebunan, Pertamina, dan pemberian Pinjaman, Usaha ini dipilih karena potensi pasar yang besar dan kebutuhan masyarakat. Pertamina menjadi salah satu usaha awal BUMDes Mandala, dengan tujuan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat. Sementara itu, usaha pinjaman bertujuan membantu masyarakat membiayai usaha atau kebutuhan. Usaha perkebunan juga dikembangkan, dengan fokus pada tanaman pangan dan hortikultura. Tujuannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangan lokal.

E. Maksud didirikan BUMDes

BUMDES harus didirikan dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mengembangkan potensi dan kekayaan desa untuk

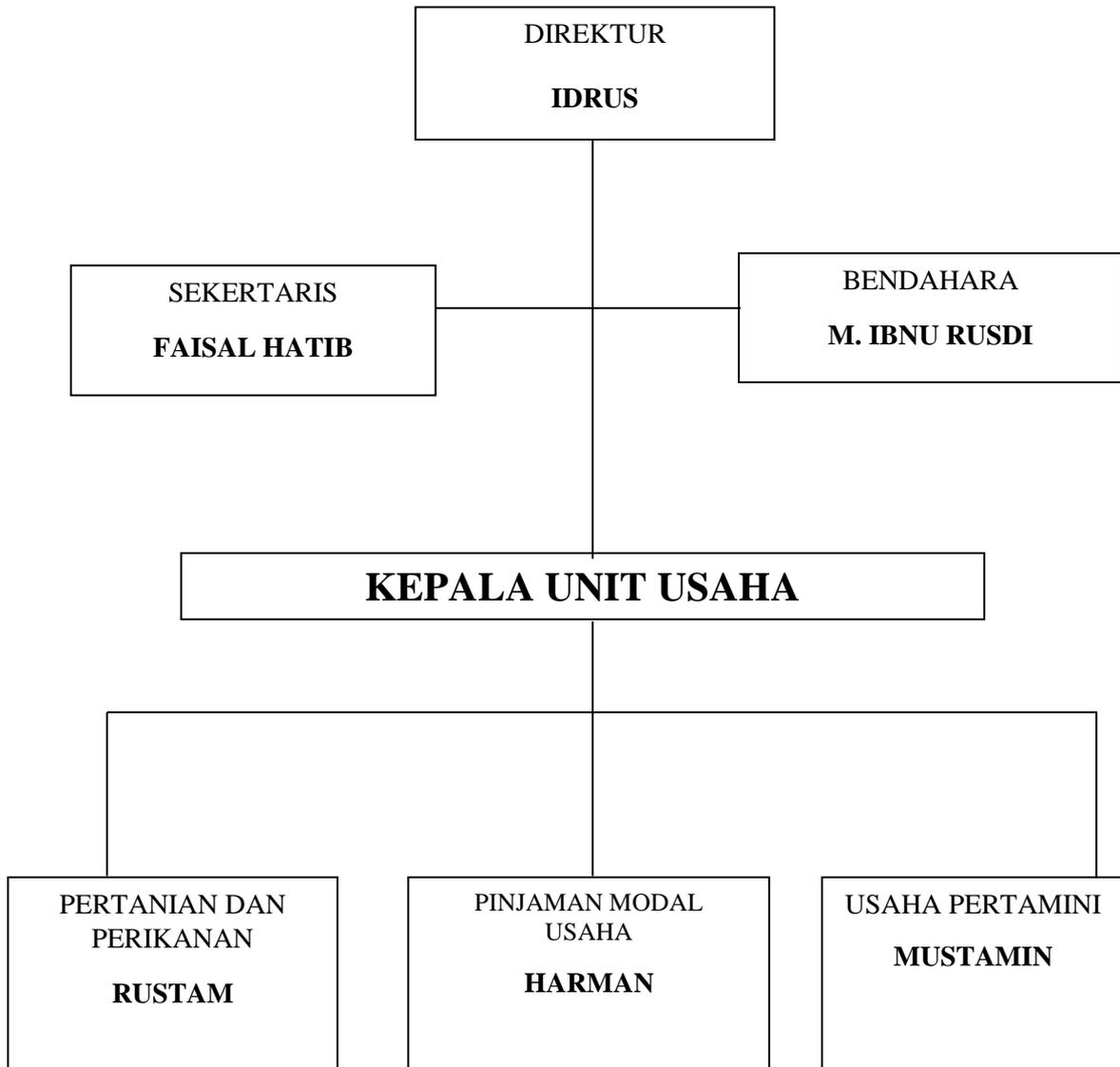
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat.

F. Struktur Organisasi BUMDes Mandala Desa Kaballangan

1. Struktur Organisasi BUMDes

Setiap badan organisasi atau perusahaan memiliki tujuan atau keinginan yang telah ditetapkan sejak awal proses perencanaan. Merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan organisasi dan menampilkan elemen fleksibel dan kejelasan adalah langkah utama dalam mencapai tujuan. Ini dilakukan karena struktur organisasi adalah alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan mereka.

Dalam proses perencanaan struktur organisasi ini, tugas, tanggung jawab, dan wewenang individu digambarkan, diatur, dan diklasifikasikan. Ini juga mencakup mengklasifikasikan setiap bagian organisasi yang ada. Selain itu, struktur harus mencakup informasi tentang jaringan koordinasi atau fungsi serta seluruh aktivitas organisasi yang saling terkait. Oleh karena itu, struktur organisasi menata proses dan mekanisme kerja serta memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BUMDes Mandala

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

a) Direktur BUMDes

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- 2) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
- 3) Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
- 4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
- 6) Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Bertindak atas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;

- 8) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDes; dan
- 9) Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

b) Sekretaris

Sekretaris memiliki wewenang :

- 1) Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha.
- 2) Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDes.
- 3) Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUMDes.
- 4) Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan usaha BUMDes.

Sekretaris memiliki tugas :

- 1) Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat direktur.
- 2) Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDes.
- 3) Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan.
- 4) Menginisiasi rapat-rapat rutin aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes.

c) Bendahara BUMDes

Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan sebuah lembaga atau perusahaan .

Bendahara memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes
- 2) Menggali sumber-sumber keuangan yang menambah sumber penghasilan BUMDes.
- 3) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes.
- 4) Menyusun laporan keuangan dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDes.

Bendahara memiliki wewenang :

- 1) Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDes.
- 2) Bersama direktur dan sekretaris Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan.
- 3) Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan BUMDes.
- 4) Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

d) Kepala Unit

Kepala unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Tugas Kepala Unit BUMDes, antara lain dapat di sebutkan sebagai berikut :

- 1) Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada direktur
- 2) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha sesuai dengan kegiatan unitnya
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
- 4) Mengukur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
- 5) Berkoordinasi dengan direktur untuk mengangkat tenaga diperlukan pendukung dan atau tenaga teknis yang;
- 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada Direktur dan Bendahara; dan
- 7) Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan wawancara terhadap informan terpilih telah dilaksanakan di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini memiliki lima informan, yaitu Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, dan masyarakat desa. Kaballangan.

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Keuangan BUMDes

Dalam pengelolaan BUMDes, dipererlukan pendirian yang kuat oleh para pengurus BUMDes agar kegiatan dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan.

Adapun indikator-indikator dari Pengelolaan Keuangan BUMDes sebagai Berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kunci untuk mencapai kemandirian dan keberhasilan usaha desa. Dengan merumuskan rencana keuangan yang jelas, pengurus BUMDes dapat memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan, serta membangun kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa untuk berinvestasi. Melalui perencanaan yang matang, BUMDes dapat mengoptimalkan potensi lokal dan berkontribusi pada perekonomian desa secara keseluruhan.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes bersifat berkelanjutan dan perlu disesuaikan dengan kondisi yang berubah setiap tahun. Rencana keuangan harus mencakup anggaran tahunan serta proyeksi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan usaha dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi desa

Berikut adalah hasil wawancara dari ketua BUMDes Terkait indikator perencanaan:

Bagaimana proses perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes di era digital?

Sekretaris Desa (Supardi) “: Melalui musyawarah desa, karena anggaran bumdes di bahas di musyawarah, nah kalau berbicara tentang digital lebih fokus ke kegiatan BUMDes lalu merapikan laporan keuangannya, karena kita mau cari keuntungan cepat ini”

Apakah bersifat berkelanjutan setiap Tahun?

Ketua BUMDes (Muh Idrus) ” Proses perencanaan pengelolaan BUMDes Mandala itu bersifat berkelanjutan, sesuai dengan usaha yang telah dikembangkan. Hanya saja dibenahi usaha-usaha yang dianggap tidak terlalu produktif, makanya dirampingkan pengurusnya hal ini dilakukan untuk menyesuaikan anggarannya. Karena ada gaji yang harus didistribusikan atau dibayarkan. Cuma sampai saat ini catatan gaji untuk pengurus itu ada tapi belum dilaporkan.”

Apakah Masyarakat dilibatkan pada proses perencanaan BUMDes?

Ketua BUMDes (Muh Idrus) “ Iya, Masyarakat dilibatkan”

Masyakat (Ibu Ani) “ Kami dilibatkan pada proses perencanaan karena dilakukan musyawarah terlebih dulu, kami juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saran.”

b. Pencatatan

Pencatatan mencakup semua tugas, termasuk pembukuan dan pembuatan laporan keuangan.. proses ini merupakan komponen penting untuk menjamin kemampuan BUMDes untuk beroperasi secara efisien dan efisien, serta mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut adalah hasil wawancara dari sekretaris Desa Terkait indikator pencatatan:

Bagaimana proses pencatatan keuangan BUMDes ?
Bendahara BUMDes (M. Ibnu Rusdi) “ Proses pencatatannya itu dicatat secara manual dulu, nanti mau tutup buku baru di diinput ke aplikasi”

Bagaimana proses pelaporan keuangan BUMDes dilakukan setelah dicatat?
Bendahara BUMDes (M. Ibnu Rusdi) “Kalau proses pelaporannya setelah transaksi di catat itu pelaporannya di desa ji kemudian desa yang laporkan ke kabupaten”

c. Pertanggungjawaban

Pengurus BUMDes Mandala harus membuat laporan tanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diberikan kepada mereka. Laporan ini harus dikirim ke Pengawas dan dibahas dalam musyawarah tahunan BUMDes.

Berikut adalah hasil wawancara dari Bendahara BUMDes Terkait indikator pertanggungjawaban:

Apa saja komponen utama yang biasanya terdapat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut?

Bendahara BUMDes “ Laporan pertanggungjawaban yang dibuat itu berisi beberapa bagian penting, seperti pendahuluan, ringkasan eksekutif, struktur organisasi, tujuan dan program yang dijalankan, rincian pendapatan dan pengeluaran.”

d. Pengawasan

Pengawasan yang baik dalam pengelolaan keuangan Sangat penting BUMDes, penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pengawas BUMDes memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasilnya kepada Musyawarah Kelurahan.

Berikut adalah hasil wawancara dari Bendahara BUMDes Terkait indikator pengawasan:

Siapa yang melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan BUMDes ini?

Menurut bapak Idrus Selaku ketua BUMDes “Pengawasan ini dikukan oleh pengawas BUMDes,”

Kapan pengawasan ini dilaksanakan, apakah ada jadwal khusus untuk melaksanakan pengawasan ini?

Menurut bapak Mustamin (Pengawas BUMDes) “Kegiatan pengawasan pada BUMDes Mandala ini waktunya tidak menentu”

2. Era Digital

Era digital memberikan kesempatan bagi BUMDes untuk bertransformasi dan berinovasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, BUMDes dapat mengimplementasikan sistem keuangan yang lebih efisien dan transparan.

Adapun indikator-indikator dari Era digital sebagai Berikut :

a) Penggunaan Infrastruktur teknologi

Penggunaan perangkat seperti komputer dalam pencatatan transaksi keuangan menjadi salah satu sorotan utama. Hal Ini tidak hanya membuat proses administrasi lebih mudah, tetapi juga meningkatkan akurasi data. Sementara itu, penilaian terhadap kualitas infrastruktur teknologi menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pelaporan keuangan. Namun, tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia yang mampu menangani teknologi tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Berikut adalah hasil wawancara dari ketua dan Sekretaris BUMDes Terkait indikator penggunaan Infrastruktur teknologi:

Apa saja perangkat teknologi yang digunakan oleh BUMDes dalam Pengelolaan Keuangan?

Ketua BUMDes (Muh Idrus) “ perangkat yang digunakan itu adalah komputer”

Bagaimana anda menilai kualitas infrastruktur teknologi tersebut?

Sekretaris BUMDes (Faisah Hatib) “ kalau berbicara tentang teknologi pasti memberikan peningkatan efisiensi bagi pelaporan keuangan.”

Apakah ada kendala yang dihadapi terkait infrastruktur teknologi yang digunakan tersebut?

Sekretaris BUMDes (Faisah Hatib) “ tetapi kendalanya itu sangat terbatas kita minta atau dapat orang-orang yang bisa duduk depan laptop”

b) Penggunaan Aplikasi keuangan

Pemanfaatan aplikasi keuangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes telah menjadi strategi krusial untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan di desa.

Berikut adalah hasil wawancara dari Sekretaris BUMDes Terkait indikator penggunaan aplikasi keuangan:

Aplikasi atau perangkat Lunak apa yang digunakan untuk pencatatan pelaporan keuangan?
Ketua BUMDes (Muh Idrus) “ Aplikasi yang digunakan itu excel tapi sudah dibangun”

Seberapa Sering Aplikasi tersebut digunakan?
Ketua BUMDes (Muh Idrus) “ Aplikasi ini digunakan pada saat akhir tahun, karena pencatatan transaksi sehari-hari dicatat secara manual”

Apakah ada kendala yang dihadapi pada saat penggunaan aplikasi?
Ketua BUMDes (Muh Idrus) “ iya ada, kendalanya itu dibagian pengkodean karena ada beberapa transaksi yang tidak diketahui kode transaksinya”

c) Pelatihan Digital

Dalam era digital saat ini, BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional

Berikut adalah hasil wawancara dari Sekretaris BUMDes Terkait Pelatihan digital:

Apakah ada program pelatihan yang diberikan kepada pengelola BUMDes terkait Penggunaan Teknologi Digital?

Ketua BUMDes (Muh Idrus) “ iya ada, pelatihannya terkait penggunaan aplikasi excel yang saya bilang tadi yang sudah dibangun tetapi pelatihan tersebut baru sempat diikuti dua kali sehingga masih ada beberapa yang kurang dimengerti dalam menggunakannya”.

B. Pembahasan

Berikut ini deskripsi Pengelolaan Keuangan BUMDes Mandala Di

Era Digital :

1. Pengelolaan Keuangan BUMDes

a) Perencanaan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses perencanaan pengelolaan BUMDes di era digital melibatkan langkah-langkah strategis yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Musyawarah desa berperan sebagai forum utama untuk membahas anggaran BUMDes, di mana kegiatan BUMDes difokuskan pada penyusunan laporan keuangan yang lebih teratur dan efisien.

Perencanaan pengelolaan BUMDes bersifat berkelanjutan dan disesuaikan dengan usaha yang telah dikembangkan, termasuk merampingkan usaha yang dianggap tidak produktif untuk menyesuaikan anggaran. Penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan yang baik sangat bergantung pada evaluasi berkala terhadap kinerja usaha, mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dengan mempertimbangkan dampak jangka

panjang terhadap keberlanjutan usaha. Di era digital, penerapan sistem keuangan digital menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas, kejelasan, dan akuntabilitas manajemen keuangan BUMDes. Digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat, sehingga pengelola dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan inisiatif lain untuk meningkatkan pendapatan desa. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memperbaiki proses administrasi tetapi juga memperkuat tata kelola BUMDes, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dan berkontribusi pada kemandirian ekonomi masyarakat.

Merampingkan usaha yang kurang produktif adalah langkah penting untuk menjamin sumber daya dimanfaatkan secara efisien dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, strategi perencanaan yang berkelanjutan tidak hanya mencakup penyesuaian anggaran tetapi juga evaluasi terhadap jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dengan melakukan evaluasi berkala, pengurus BUMDes dapat mengidentifikasi usaha-usaha yang tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan desa. dan mengambil keputusan untuk menghentikan atau merampingkan usaha tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keberlanjutan operasional BUMDes relevan dengan

arahan PP No. 11 Tahun 2021 yang mendorong pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan dan efisien.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa, di mana anggaran dibahas secara kolektif. Hal ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan PP No. 11 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa. Sekretaris Desa, Supardi, menekankan bahwa fokus digitalisasi diarahkan pada penyempurnaan laporan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan BUMDes juga menjadi aspek penting yang diungkapkan oleh Ketua BUMDes dan Ibu Ani sebagai warga desa. Musyawarah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran mereka. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi publik dalam pengelolaan desa, di mana keterlibatan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Penelitian oleh Iryani et al. (2020) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas program desa.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan di kalangan warga tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dengan baik. Dalam proses musyawarah, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan mengenai prioritas program yang akan dijalankan oleh BUMDes. Hal ini memungkinkan pengurus BUMDes untuk lebih memahami kebutuhan riil masyarakat dan merancang program-program yang relevan serta bermanfaat bagi semua pihak.

Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil oleh pengurus BUMDes. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka cenderung lebih mendukung program-program yang dijalankan serta lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan BUMDes.

Digitalisasi menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan BUMDes di era modern ini. Penerapan sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian oleh Pratiwi dan Novianty berjudul Digitalisasi BUMDes: Inovasi Desa di Era Teknologi menunjukkan bahwa penggunaan Berbagai proses administrasi dan operasional dapat diotomatisasi oleh teknologi digital., termasuk pencatatan keuangan. Digitalisasi

laporan keuangan tidak hanya mempermudah pencatatan tetapi juga memperkuat akuntabilitas dengan memungkinkan setiap transaksi dilacak dengan jelas. Dengan adanya sistem digital, pengurus BUMDes dapat mengakses data keuangan secara real-time, sehingga memudahkan mereka dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini.

Selain itu, digitalisasi juga membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi serta meminimalisir risiko kehilangan data akibat kerusakan fisik dokumen. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan BUMDes juga membuka peluang untuk inovasi lebih lanjut, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi bagi anggota masyarakat. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat laporan keuangan secara transparan dan memberikan masukan atau pertanyaan terkait penggunaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Lutfia, dan Soemarsono berjudul " Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Era Digital Melalui Manajemen SDM diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi laporan keuangan untuk meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Dengan demikian, penerapan sistem digital dalam pencatatan keuangan menjadi langkah strategis yang tidak

hanya menyederhanakan proses tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Rapat untuk persiapan tidak terlalu sering dilakukan di BUMDes Mandala. Rapat tersebut diadakan pada awal tahun pembukuan. Jika ada perubahan, rapat akan membahas dan menetapkan AD/ART. BUMDes Mandala Selain itu, mereka juga akan menyetujui Rancangan Anggaran yang diajukan oleh setiap unit usaha, dengan harapan mendapatkan tambahan modal. Sejak lima tahun terakhir, permodalan BUMDes Mandala telah difokuskan pada unit-unit seperti Perkebunan, Simpan Pinjam, dan Pertamina.

1) Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam merupakan salah satu unit pertama yang ada di BUMDes Mandala di Desa Kaballangan. Unit ini berdiri berdasarkan usulan pemerintah desa sendiri. Menurut data, pada tahun 2021, unit Simpan Pinjam berhasil menerima tambahan modal sebesar Rp 82.000.000. Tidak memiliki prosedur standar operasional prosedur (SOP) untuk permohonan pinjaman, sehingga perencanaan unit simpan pinjam dilakukan dengan buruk. Tidak ada tanda tangan di surat pencairan saat dana pinjaman dicairkan. Oleh karena itu, beberapa pinjaman masih belum dibayarkan.

2) Perikanan dan Perkebunan

Untuk usaha perikanan dan perkebunan, proses perencanaan belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dengan Ketua BUMDes, Usaha ini mengalami masalah pada permodalan awal. Permodalan merupakan salah satu kendala utama bagi pengusaha perikanan yang beroperasi di bawah BUMDes. usaha perikanan dan perkebunan mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal yang cukup untuk pengembangan usaha, seperti pembelian bibit ikan dan pakan.

3) Pertamina

Unit Pertamina ini sudah ada Sejak 2022. Unit Pertamina yang dikelola oleh BUMDes Mandala memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Dari Hasil Wawancara oleh Pengelola Unit pertamini ini hanya menyetorkan hasil penjualannya senilai Rp50.000,00 perbulannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah desa, fokus pada penyusunan laporan keuangan yang teratur dan efisien, serta perampingan usaha yang kurang produktif adalah langkah-langkah strategis yang relevan. Terlebih lagi, digitalisasi sistem keuangan

menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas, kejelasan, dan akuntabilitas. Di era modern ini, digitalisasi adalah suatu keharusan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan, keterlibatan masyarakat, dan perampingan usaha yang kurang produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat dan evaluasi berkala. Perlu dipastikan bahwa sistem digital yang diterapkan mudah digunakan, pengurus BUMDes memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikannya, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan.

b) **Pencatatan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencatatan keuangan BUMDes dilakukan dengan cara manual sebelum diinput ke dalam aplikasi, dan pelaporan keuangan dilakukan melalui desa ke kabupaten setelah pencatatan transaksi. Hal ini mencerminkan mekanisme pencatatan yang masih tradisional dan bergantung pada input manual, yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahan dan keterlambatan dalam pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes, terdapat beberapa aspek penting

yang dapat dianalisis lebih lanjut dengan mengacu pada PP No. 11 Tahun 2021. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pencatatan keuangan BUMDes masih dilakukan secara manual sebelum diinput ke dalam aplikasi, dan pelaporan keuangan dilakukan melalui desa ke kabupaten. Hal ini mencerminkan sistem pencatatan yang tradisional dan berpotensi menimbulkan kesalahan serta keterlambatan dalam pelaporan.

Proses pencatatan yang dilakukan secara manual dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk ketidakakuratan data dan efisiensi yang rendah. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021, salah satu tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan autonomi ekonomi desa dengan mengelola usaha yang efisien dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital yang lebih modern dan efisien.

Pencatatan yang masih dilakukan secara manual sebelum diinput ke dalam aplikasi, serta pelaporan keuangan melalui hierarki desa ke kabupaten, mencerminkan sistem yang tradisional dan berpotensi menimbulkan kesalahan dan keterlambatan. Ini juga sejalan dengan prinsip dasar akuntansi yang ditekankan oleh Pipit Mulyah, Dyah Aminatun et al. (2020) dalam penelitian mereka, bahwa pencatatan yang sistematis dan akurat merupakan langkah awal yang krusial dalam siklus akuntansi.

Pelaporan keuangan dari BUMDes ke tingkat desa dan kemudian ke kabupaten menunjukkan adanya hierarki yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi informasi keuangan. PP No. 11 Tahun 2021 menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks ini, sistem pelaporan yang terlalu berjenjang dapat menghambat aliran informasi yang cepat dan akurat, sehingga perlu adanya reformasi dalam mekanisme pelaporan.

Menurut teori akuntansi, pencatatan yang sistematis dan akurat merupakan langkah awal yang krusial dalam siklus akuntansi. Pencatatan yang baik tidak hanya mempengaruhi kualitas laporan keuangan tetapi juga transparansi dan akuntabilitas BUMDes kepada masyarakat dan pemerintah. Teori ini sejalan dengan prinsip dasar akuntansi yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara tepat waktu dan akurat untuk menghasilkan laporan yang dapat dipercaya (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun et al., 2020)

Penelitian sebelumnya oleh Intan Febianti (2022) menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan keuangan di BUMDes Berkah Abadi belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak BUMDes masih menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem pencatatan yang efektif, mirip dengan temuan dalam penelitian ini.

Proses pencatatan di BUMDes Mandala dimulai dengan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan bon yang menunjukkan barang yang dibeli dan dijual. Buku kas harian akan menyimpan semua transaksi. dan disimpan di rekening rekening. Merangkum secara manual untuk mencatat aliran uang masuk dan keluar.

Dari segi kelengkapan pencatatan laporan keuangan BUMDes Mandala pada tahun 2023 hingga saat ini, laporan keuangan yang dihasilkan masih belum komprehensif dan tidak relevan dengan SAK ETAP. laporan keuangan seharusnya mencakup lima komponen, namun BUMDes Mandala hanya mampu mencatat kas umum berupa kas masuk dan keluar untuk setiap periode akuntansi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang seharusnya.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik serta kurangnya keterlibatan pemerintah kabupaten dalam sosialisasi pembuatan laporan keuangan BUMDes. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan masih sangat sederhana dan jauh dari standar akuntansi yang berlaku.

penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nur, Roni Hakim, dan Hariadi (2023) tentang pengelolaan BUMDes di Sipakamase Pincara, Kabupaten Pinrang, yang menemukan bahwa meskipun pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha sudah baik, terdapat kekurangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ini menunjukkan bahwa masalah SDM merupakan tantangan umum yang dihadapi BUMDes di wilayah Pinrang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak BUMDes, termasuk BUMDes Mandala, menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem pencatatan yang efisien yang mengikuti peraturan akuntansi yang berlaku. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam sosialisasi pembuatan laporan keuangan menjadi kendala utama. PP No. 11 Tahun 2021 mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan keuangan BUMDes dapat dilakukan dengan lebih baik.

Digitalisasi laporan keuangan BUMDes merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan sistem digital, proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Digitalisasi juga memungkinkan

pengelola untuk lebih fokus pada pengembangan usaha dan inisiatif lain yang dapat meningkatkan pendapatan desa

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, strategi pencatatan keuangan BUMDes secara manual sebelum diinput ke dalam aplikasi dan pelaporan keuangan yang dilakukan melalui desa ke kabupaten kurang cocok untuk diterapkan saat ini karena berpotensi menimbulkan kesalahan dan keterlambatan:

Berikut adalah alasan mengapa strategi tersebut kurang efektif dan alternatif yang lebih baik:

1) Ketidakakuratan dan Efisiensi Rendah

Pencatatan manual rentan terhadap kesalahan manusia dan kurang efisien. Digitalisasi dapat mengotomatiskan proses pencatatan, mengurangi kesalahan, dan mempercepat penyusunan laporan keuangan.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

PP No. 11 Tahun 2021 menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang sulit dicapai dengan sistem pelaporan berjenjang. Sistem digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi keuangan.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak BUMDes menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Digitalisasi dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli.

4) Kurangnya Sosialisasi dan Dukungan

Kurangnya keterlibatan pemerintah kabupaten dalam sosialisasi pembuatan laporan keuangan BUMDes menjadi kendala. Pemerintah perlu memfasilitasi diskusi, komunikasi, dan transformasi pengetahuan tentang digitalisasi BUMDes.

Adapun strategi yang lebih efektif yang dapat diterapkan seperti :

- 1) Digitalisasi Keuangan BUMDes untuk menerapkan sistem digital untuk pencatatan transaksi secara otomatis.
- 2) Pelatihan SDM untuk Memberikan pelatihan rutin kepada staf BUMDes untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas untuk Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
- 4) Dukungan Pemerintah untuk Pemerintah perlu memberikan dukungan dan sosialisasi terkait pembuatan laporan keuangan BUMDes.

c) **Pertanggungjawaban**

Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Bendahara BUMDes mencakup beberapa komponen utama yang esensial untuk transparansi dan akuntabilitas. Komponen tersebut meliputi pendahuluan, ringkasan eksekutif, struktur organisasi, tujuan dan program yang dijalankan, serta rincian pendapatan dan pengeluaran.

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan dalam laporan pertanggungjawaban berfungsi untuk memberikan konteks dan latar belakang mengenai BUMDes itu sendiri. Di sini, penting untuk menjelaskan visi dan misi BUMDes serta alasan mengapa laporan ini disusun. Pendahuluan yang baik akan membantu pembaca memahami pentingnya laporan ini dalam rangka menilai kinerja dan akuntabilitas BUMDes.

2. Ringkasan Eksekutif

Selanjutnya, ringkasan eksekutif menjadi bagian yang krusial karena menyajikan gambaran umum tentang kinerja BUMDes selama periode laporan. Dalam bagian ini, informasi yang disampaikan harus mencakup pencapaian utama yang telah diraih, tantangan yang dihadapi selama periode tersebut, dan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah. Ringkasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman cepat kepada

pembaca mengenai kondisi BUMDes tanpa harus membaca keseluruhan laporan.

3. Struktur Organisasi

Pentingnya menyertakan struktur organisasi dalam laporan adalah untuk menunjukkan bagaimana BUMDes dikelola. Dengan mencantumkan struktur organisasi, pembaca dapat memahami siapa saja yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi dalam organisasi. Ini juga berfungsi untuk memperjelas alur komunikasi dan pengambilan keputusan di dalam BUMDes, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana pengelolaan dilakukan

4. Tujuan dan Program

Bagian tujuan dan program menjelaskan arah strategis BUMDes serta program-program yang telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, BUMDes perlu menguraikan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya serta bagaimana program-program tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Ini tidak hanya memberikan gambaran tentang aktivitas yang dilakukan, tetapi juga menunjukkan komitmen BUMDes terhadap pembangunan desa

5. Rincian Pendapatan dan Pengeluaran

Rincian pendapatan dan pengeluaran adalah salah satu bagian terpenting dari laporan pertanggungjawaban. Di sini,

BUMDes harus menyajikan informasi secara rinci mengenai sumber-sumber pendapatan yang diperoleh—baik dari dana desa maupun dari usaha yang dijalankan—serta pengeluaran untuk operasional dan investasi. Transparansi dalam penyajian data keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes

Laporan Pertanggungjawaban BUMDes dibuat setiap akhir masa kepengurusan dan berisi pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan selama satu periode waktu.

PP No 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes. Pasal 11 menyebutkan bahwa Anggaran Dasar BUMDes harus dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa, serta harus mencakup berbagai aspek informasi seperti nama, lokasi, tujuan dan tujuan pendirian BUMDes, modal, dan jenis usaha, serta hak dan tanggung jawab pengurus BUMDes.

Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang semakin kompleks, strategi penyusunan laporan pertanggungjawaban bukan hanya menjadi relevan, tetapi esensial untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas. Di era digital yang serba terbuka ini, masyarakat semakin cerdas dan kritis, aktif

mencari informasi terkait pengelolaan keuangan desa dan menuntut transparansi.

BUMDes yang enggan membuka diri dan menyajikan laporan secara transparan akan kehilangan kepercayaan masyarakat, berbanding terbalik dengan BUMDes yang proaktif, yang justru akan mendapatkan dukungan lebih besar karena dianggap melibatkan dan menghargai partisipasi masyarakat. Selain itu, regulasi pemerintah juga semakin menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, menjadikan laporan pertanggungjawaban sebagai alat penting untuk memenuhi tuntutan peraturan yang memastikan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, strategi ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan yang sejalan dengan tuntutan masyarakat, regulasi pemerintah, serta semangat transparansi yang semakin menguat dalam pengelolaan BUMDes.

Namun, perlu diingat bahwa efektivitas strategi ini tidak hanya bergantung pada penyusunan laporan semata. Laporan yang bagus dan transparan akan menjadi sia-sia jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat, tidak digunakan sebagai bahan evaluasi, dan tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan yang konkret. Efektivitas strategi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci:

1. Kualitas Laporan

Laporan harus disusun secara akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penggunaan bahasa yang sederhana dan visualisasi data yang menarik dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat.

2. Sosialisasi

Laporan harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti forum desa, media sosial, atau website desa. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan BUMDes.

3. Evaluasi

Laporan harus dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan BUMDes. Evaluasi ini dapat melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

4. Tindak Lanjut

Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan yang konkret. Jika ditemukan adanya penyimpangan, harus dilakukan tindakan korektif yang tegas.

d) **Pengawasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan oleh pengawas BUMDes yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan dan operasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan protokol yang berlaku. Kegiatan pengawasan ini tidak memiliki jadwal tetap dan dilaksanakan sesuai kebutuhan, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menanggapi situasi yang muncul di lapangan sehing. Pengawas BUMDes bertanggung jawab untuk memantau semua tindakan serta memberikan rekomendasi kepada manajer operasional dalam mengelola usaha desa. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan kejelasan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Di era digital, penerapan sistem informasi dapat memperkuat proses pengawasan ini, memungkinkan pemantauan yang lebih baik dan aksesibilitas informasi keuangan yang lebih tinggi bagi semua pihak terkait.

Pengawasan merupakan elemen krusial dalam pengelolaan BUMDes karena berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Teori pengawasan yang relevan dalam konteks ini adalah Teori Akuntabilitas, yang menyatakan bahwa semua entitas yang mengelola sumber daya

publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat (Bovens, 2020). Dalam hal ini, pengawas BUMDes memiliki peran penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Secara spesifik, pengawasan di BUMDes bertujuan untuk:

- 1) Mencegah Penyimpangan: Dengan adanya pengawas, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana. Pengawas bertugas untuk memantau setiap transaksi keuangan dan Anggaran yang telah disetujui harus dipatuhi untuk setiap kegiatan.
- 2) Meningkatkan Transparansi: Pengawasan yang baik akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat desa berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, laporan hasil pengawasan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
- 3) Memberikan Rekomendasi untuk Perbaikan: Pengawas tidak hanya bertugas untuk mengawasi tetapi juga memberikan rekomendasi kepada pengurus BUMDes untuk perbaikan. Hal ini penting agar pengelolaan ke depan dapat lebih baik dan efektif.

PP No 11 Tahun 2021 yang mengatur BUMDes mengatur tentang struktur organisasi dan fungsi pengawasan. Pasal 15

menyebutkan bahwa dalam struktur organisasi BUMDes harus terdapat perangkat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional dan keuangan. Pengawas diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan BUMDes.

Penelitian oleh Hidayah (2020) menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai tim pengawas. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi program-program BUMDes dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan instruksi. Penelitian ini juga mencatat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat krusial untuk meningkatkan akuntabilitas.

Pada BUMDes Mandala. Kegiatan Pengawasan tidak sering dilakukan karena tidak ada jadwal yang ditetapkan. Pada akhir tahun pembukuan, laporan pertanggungjawaban BUMDes akan diperiksa oleh pengawas dan Penasehat BUMDes. Laporan ini kemudian disahkan dan disampaikan saat Musyawarah Pertanggungjawaban.

Ketidakpastian waktu dalam pelaksanaan pengawasan ini dapat menyebabkan kurangnya konsistensi dalam evaluasi kinerja dan laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pengelolaan. kurangnya jadwal tetap untuk kegiatan pengawasan dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaporan

dan evaluasi, sehingga menghambat proses perbaikan yang diperlukan

Di era digital yang serba cepat ini, strategi pengawasan BUMDes, termasuk di BUMDes Mandala, sangat relevan dan penting untuk diterapkan. Karena pengawasan adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Apalagi, di era digital, teknologi menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan

Namun, efektivitas strategi pengawasan di BUMDes Mandala saat ini belum mencapai potensi maksimalnya. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya pengetahuan akuntansi di kalangan pengurus BUMDes menjadi hambatan utama. Akuntansi bukan hanya sekadar mencatat transaksi, tetapi juga memahami implikasi keuangan dari setiap keputusan. Tanpa pemahaman yang memadai, pengurus BUMDes akan kesulitan menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan, yang pada gilirannya akan menghambat proses pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan di BUMDes Mandala belum sepenuhnya efektif karena adanya tantangan-tantangan seperti, Pengawasan di BUMDes Mandala, meski telah diupayakan, masih menghadapi sejumlah kendala

signifikan yang menghambat efektivitasnya. Ibarat sebuah rumah yang ingin dibangun kokoh, fondasinya masih belum kuat. Fondasi di sini adalah pengetahuan akuntansi para pengurus BUMDes. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dasar akuntansi menjadi penghalang utama dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai standar. Tanpa fondasi yang kuat, sulit bagi BUMDes untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang merupakan inti dari pengawasan yang efektif.

2. Era Digital

a) Infrastruktur Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat utama yang digunakan oleh BUMDes adalah komputer. Penggunaan komputer sebagai perangkat utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes menunjukkan langkah positif menuju digitalisasi. Meskipun sederhana, komputer dapat mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, BUMDes perlu mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak akuntansi yang lebih spesifik dan terintegrasi, yang dapat membantu dalam otomatisasi dan analisis data keuangan.

Keberadaan infrastruktur teknologi yang ada telah memberikan peningkatan efisiensi dalam pelaporan keuangan. Digitalisasi laporan keuangan tidak hanya mempercepat proses pelaporan tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelola dapat lebih mudah melakukan analisis terhadap data keuangan, sehingga pengambilan keputusan lebih efisien dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang diharapkan dalam pengelolaan BUMDes.

Dalam konteks teori SIA, Untuk berfungsi dengan baik, sistem informasi harus dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi, BUMDes dapat mengotomatiskan banyak proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan tetapi juga meningkatkan kualitas data yang dibuat. Sistem informasi yang baik akan membantu dalam menyusun laporan keuangan yang lebih komprehensif, sehingga pihak-pihak terkait dapat membuat keputusan berdasarkan data yang valid.

Pemanfaatan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan keuangan BUMDes memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Digitalisasi laporan keuangan memungkinkan pencatatan transaksi secara langsung, mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi data, serta mempercepat proses pelaporan.

Digitalisasi laporan keuangan juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya sistem digital, semua transaksi dapat dilacak dengan mudah, dan laporan keuangan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa dan pemerintah daerah. Transparansi ini

penting untuk membangun kepercayaan antara BUMDes dan masyarakat, serta antara BUMDes dan pemerintah.

Dalam kerangka SIA, transparansi informasi merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Informasi yang jelas dan terbuka mengenai pengelolaan keuangan akan memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana desa digunakan dan dikelola. Hal ini juga akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel.

Meskipun banyak manfaat dari penggunaan teknologi, terdapat kendala signifikan terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan perangkat teknologi tersebut. Seperti diungkapkan oleh Faisah Hatib, tanpa individu yang terampil dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem informasi lainnya, efektivitas penggunaan teknologi akan berkurang.

Keterbatasan SDM ini menjadi tantangan besar bagi banyak BUMDes, khususnya di wilayah yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke pelatihan atau pendidikan terkait teknologi informasi. Dalam konteks SIA, Berhasilnya sistem informasi bergantung pada kemampuan pengguna. Untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Oleh sebab karena itu, penting

bagi BUMDes untuk tidak hanya fokus pada penerapan teknologi tetapi juga pada pengembangan kapasitas SDM.

Strategi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan BUMDes sangat cocok untuk diterapkan saat ini. Digitalisasi laporan keuangan mempercepat proses pelaporan, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pihak-pihak terkait. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tuntutan masyarakat akan transparansi.

Strategi ini sangat bergantung pada kemampuan BUMDes untuk mengatasi kendala yang ada. Keterbatasan SDM yang terampil dalam mengoperasikan perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi lainnya menjadi penghalang utama. Tanpa SDM yang kompeten, investasi dalam teknologi tidak akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk tidak hanya fokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, BUMDes perlu memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang lebih spesifik dan terintegrasi dapat mengotomatiskan banyak proses pencatatan dan pelaporan

keuangan, serta menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan.

b) Penggunaan Aplikasi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes masih terbatas dan memerlukan perbaikan. Dari hasil penelitian aplikasi yang digunakan adalah Excel yang telah dimodifikasi, namun penggunaannya hanya dilakukan pada akhir tahun untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini mencerminkan praktik yang kurang optimal, di mana pencatatan transaksi sehari-hari masih dilakukan secara manual. Hal ini mencerminkan keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi yang seharusnya dapat mempermudah proses akuntansi.

Penggunaan Excel sebagai alat pencatatan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memanfaatkan teknologi, masih terdapat keterbatasan dalam hal kompleksitas dan fitur yang dapat mendukung pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan lain yang menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih mengandalkan metode manual atau perangkat lunak sederhana untuk pencatatan keuangan

Hal ini sejalan dengan teori Sistem informasi Akuntansi. Teori ini menekankan pentingnya sistem informasi yang terintegrasi

untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Menurut teori ini, sistem akuntansi yang baik harus mampu mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan tepat waktu dan akurat. Penggunaan aplikasi keuangan yang lebih canggih dibandingkan dengan Excel dapat membantu BUMDes dalam mencapai tujuan tersebut dengan menyediakan fitur otomatisasi dan pelaporan yang lebih baik.

Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi yang lebih canggih dibandingkan dengan Excel, BUMDes dapat mengotomatisasi banyak proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses pelaporan tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan akurat dan tepat waktu, mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.

Pengkodean transaksi juga merupakan kendala dalam penggunaan aplikasi, di mana beberapa transaksi tidak memiliki kode yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem pengkodean yang seharusnya sudah terstandarisasi. Penelitian sebelumnya oleh Raharjo (2019) menunjukkan bahwa banyak BUMDes mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem

akuntansi yang terstruktur karena kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang pengkodean transaksi

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk memanfaatkan teknologi melalui penggunaan Excel, praktik saat ini di BUMDes masih kurang optimal dan memerlukan perbaikan signifikan. Penerapan teori Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi keuangan yang lebih canggih dapat membantu BUMDes mencapai tujuan efisiensi operasional dan transparansi keuangan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut melalui pelatihan dan penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, BUMDes tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya tetapi juga akan memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat desa serta pihak-pihak terkait lainnya.

Inspirasi dapat diambil dari penelitian Ni Kadek Sinarwati, Edy Sujana, Ni Ketut Kertiasih, dan Ihfadna Al Insani (2023), yang mengembangkan prototipe SAKU (Sistem Analisis Kelayakan Usaha) BUMDes Berbasis Android. Meskipun BUMDes Mandala mungkin tidak langsung mengadopsi SAKU, prinsip-prinsipnya – yaitu digitalisasi kegiatan usaha dan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata – sangat relevan. Sistem yang diimplementasikan harus mampu menyajikan data yang diperlukan BUMDes untuk membantu mereka membuat

analisis kelayakan usaha, dan mudah digunakan oleh pengurus BUMDes.

Direkomendasikan kepada BUMDes Mandala, berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, untuk sebaiknya mengadopsi sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan efisien melalui implementasi aplikasi akuntansi berbasis cloud. Hal ini krusial mengingat keterbatasan yang ditemukan dalam penggunaan Excel, yang hanya dimanfaatkan pada akhir tahun untuk penyusunan laporan, serta tantangan dalam pengkodean transaksi.

Dua aplikasi berbasis cloud yang sangat disarankan untuk dipertimbangkan adalah BukuKas dan Jurnal ID. BukuKas, dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, ideal bagi pengurus BUMDes dengan keterbatasan pemahaman akuntansi. Aplikasi ini menyediakan fitur pencatatan transaksi harian, pembuatan laporan keuangan dasar, dan pengelolaan inventaris. Sementara itu, Jurnal ID menawarkan fitur yang lebih komprehensif, mencakup pengelolaan faktur, inventaris, dan pelaporan keuangan yang lebih detail.

Keunggulan utama dari penggunaan aplikasi berbasis cloud adalah kemudahan aksesibilitas, biaya yang relatif terjangkau dibandingkan sistem konvensional, serta keamanan data yang terjamin oleh penyedia layanan. Selain itu, aplikasi berbasis cloud

memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pengurus BUMDes, akuntan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Namun, implementasi aplikasi ini harus diiringi dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai bagi pengurus BUMDes. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang fitur-fitur aplikasi, pengoperasian yang efektif, serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang benar dalam pencatatan transaksi. Dengan demikian, BUMDes Mandala dapat memaksimalkan manfaat dari aplikasi akuntansi berbasis cloud, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik kepada masyarakat desa.

c) Pelatihan Digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan yang diserahkan kepada pengelola BUMDes memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan manajerial dan pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, pelatihan tidak hanya berperan sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan pengelola BUMDes dalam menghadapi tantangan yang ada di lingkungan mereka.

Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman pengelola BUMDes dalam menggunakan teknologi digital, terutama aplikasi keuangan

seperti Excel. Menurut penelitian oleh Ibrahim (2023), pelatihan yang terfokus pada penggunaan aplikasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional BUMDes. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan sebanyak dua kali, masih ada beberapa pengelola yang merasa kurang memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi pelatihan yang terbatas dapat menjadi kendala dalam optimalisasi penggunaan teknologi.

Dalam konteks ini, Teori Akuntansi Manajerial sangat relevan. Teori ini menekankan pentingnya informasi akuntansi yang tepat waktu dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Pelatihan yang diberikan diharapkan dapat membantu pengelola BUMDes memahami cara menyusun laporan keuangan dengan benar dan mengelola transaksi harian secara efektif. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk perencanaan strategis dan evaluasi kinerja BUMDes.

Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus BUMDes dalam bidang akuntansi, keuangan, dan penggunaan teknologi digital. Ini sejalan dengan PP No. 11 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan keuangan BUMDes dapat dilakukan dengan lebih baik. Sejalan dengan temuan Fathor Rahman et al. (2024) bahwa

kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui proses rekrutmen yang lebih selektif, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penghargaan yang memadai. Bentuk pelatihan ini dapat mengadopsi metode ceramah, simulasi, dan tanya jawab yang efektif seperti yang digunakan oleh Adella Vian dan Rifai Al Imunur (2023) dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kemajuan teknologi.

Penelitian sebelumnya juga mendukung pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes. Misalnya, penelitian oleh Ketut Putri Andayani (2021) menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan akuntansi bagi pengelola BUMDes di Desa Huangobotu berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang pencatatan dan pengelolaan keuangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan mampu memahami mekanisme pencatatan dan penatausahaan keuangan, sehingga memudahkan mereka dalam membuat perencanaan usaha dan teknik pengawasan terhadap lembaga BUMDes.

Selain itu, penelitian oleh Sofyani et al. (2020) menyimpulkan bahwa peningkatan keterampilan digital di kalangan pengelola BUMDes berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik. Mereka mengidentifikasi bahwa BUMDes yang menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan teknologi informasi memiliki laporan keuangan yang lebih jelas

dan tepat. Ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga berdampak positif pada keseluruhan kinerja organisasi.

Pelatihan digital untuk pengelolaan keuangan BUMDes merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan era digital. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan pengurus BUMDes dalam menggunakan teknologi informasi, seperti perangkat lunak akuntansi dan sistem manajemen keuangan berbasis digital.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat pemahaman pengelola terhadap materi yang diajarkan. Meskipun mereka telah mengikuti pelatihan, beberapa dari mereka masih merasa kurang yakin dalam menggunakan aplikasi Excel secara efektif. Ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti:

1) Frekuensi Pelatihan:

Dengan hanya dua sesi pelatihan, waktu yang tersedia untuk mendalami materi menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang tidak mendalam dan ketidakmampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata.

2) Keterbatasan Waktu:

Pengelola BUMDes sering kali dihadapkan pada banyak tugas dan tanggung jawab lainnya. Keterbatasan waktu ini

membuat mereka sulit untuk meluangkan waktu belajar tambahan di luar sesi pelatihan.

3) Akses terhadap Teknologi

Beberapa pengelola mungkin tidak memiliki akses yang cukup ke komputer atau internet, yang sangat penting untuk berlatih menggunakan aplikasi Excel

Strategi pengelolaan keuangan BUMDes di era digital sangat cocok untuk diterapkan saat ini. Digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi dan transparansi hingga kemudahan akses informasi. Dengan sistem digital, BUMDes dapat mengelola keuangan secara lebih efektif, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan akuntabilitas.

Efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan BUMDes dalam menghadapi tantangan yang ada. Pengurus BUMDes perlu meningkatkan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta menguasai teknologi digital. Selain itu, BUMDes perlu memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan terintegrasi dengan baik.

Digitalisasi pengelolaan keuangan BUMDes adalah langkah yang tepat, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan SDM dan pemahaman yang mendalam tentang akuntansi. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, BUMDes Mandala memiliki potensi

besar untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan keuangan BUMDes Mandala Desa Kaballangan belum sepenuhnya efektif karena adanya berbagai tantangan yang masih perlu diatasi. Meskipun BUMDes Mandala Desa Kaballangan menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangannya, terdapat potensi besar untuk perbaikan melalui langkah-langkah strategis seperti digitalisasi sistem pencatatan, pelatihan SDM, pengembangan SOP, dan penetapan jadwal pengawasan. Dengan komitmen untuk menerapkan perubahan ini, BUMDes tidak hanya akan meningkatkan kinerjanya tetapi juga berkontribusi positif terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Selain itu penting untuk meningkatkan pemilihan aplikasi keuangan, memperkuat infrastruktur teknologi, serta memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih baik kepada pengelola. Dengan langkah-langkah ini, BUMDes dapat meningkatkan kinerja keuangannya, memperkuat akuntabilitas, dan pada akhirnya berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di BUMDes Mandala desa Kaballangan, penulis dapat membuat rekomendasi berikut:

1. Disarankan agar proses rekrutmen karyawan BUMDes dilakukan berdasarkan pada kompetensi yang relevan dengan kebutuhan operasional BUMDes, bukan hanya berdasarkan kedekatan personal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDes
2. Perlu dilakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala dan memberikan umpan balik konstruktif serta pelatihan tambahan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka dan Penerapan aturan dan prosedur yang jelas untuk meningkatkan disiplin dalam penyusunan laporan keuangan dan administrasi BUMDes.
3. Disarankan untuk mengimplementasikan sistem akuntansi yang terstandarisasi dan mudah digunakan oleh pengurus BUMDes. Pelatihan intensif perlu diberikan untuk memastikan pemahaman dan penggunaan sistem secara efektif.
4. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (SAK ETAP) dan dipastikan semua transaksi dicatat secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2020). *Peran dan Fungsi BUMDes dalam Pembangunan perdesaan. 2010*, 1–23.
- Amelia, F., Hamdani, & Juniar Asrid. (2024). Determinan Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis TataKelola Organisasi yang Baik. *YUME : Journal of Management*, 7(2), 639–646.
- Andiny, T. T. (2023). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Diakonia di Era Digital. *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 3(1), 82–87. <https://doi.org/10.54170/dp.v3i1.204>
- Ardiyansyah, C., & Pesudo, D. (2022). Gaya Kepemimpinan, Kearifan Lokal, Dan Akuntabilitas Bumdes. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(2), 38–55. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.9953>
- Arodhiskara, Y., Ladung, F., Jumriani, J., & Suherman, S. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Umkm Binaan Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan Kota Parepare. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(02), 1–8. <https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.21686>
- Bahrudin, Syukri, F., & Abbas, N. A. (2022). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Daerah Pedesaan (Studi Kasus Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang). *Cateris Paribus Journal*, 2(1), 18.
- Haliza, N. (2023). “Analisis Kebutuhan Modal BUMDes Madalleng Terhadap Pengembangan Potensi Desa Cemba Kabupaten Enrekang. *Dd*, 1–23.
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Herlina, D. (2023). Pengembangan Digitalisasi Bumdes di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Bumdes Makmur Abadi Sejahtera di Desa Pasir Bintang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 654–661.
- Indriani, I., & Arham, A. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CAHAYA BARU DI DESA KUNYI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *DECISION : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 151–164. <https://doi.org/10.31850/decision.v5i1.2931>
- Iriani, N. I., Nugroho, A. P., & Tia, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDES Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 10(1), 27.

https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/3543/pdf_1

- Ishak, P., & Syam, F. (2020). Pengaruh kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 120–130. <https://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/view/45%0Ahttps://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/download/45/12>
- Ladung, F., & Syukri, F. (2022). Pemetaan Potensi Desa Sebagai Koorbisnis Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang). *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 256–265. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>
- Lelisa Army, W., Anita, S., Informasi, S., & Pertiwi, U. (2023). Rancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan. *Jurnal Stars*, 1(2), 24–28.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80–93. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.80-93>
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). MEKANISME PENCATATAN KEUANGAN UNIT USAHA PERDAGANGAN PERTANIAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERKAH ABADI DESA KRAWANGSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Puspitasari, M., Ardiyansyah, C., & Hapsari, A. N. S. (2022). Mampukah Gaya Kepemimpinan Mendorong Pengelolaan Keuangan BUMDes yang Akuntabel dan Transparan? *Perspektif Akuntansi*, 5(3), 273–295. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p273-295>
- Rika Widianita, D. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDe) PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No

3), 34–46.

- Siagian, A. O. (2021). Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Oesena Di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 33. <https://doi.org/10.30587/jre.v4i1.2221>
- Sinarwati, N. K., Sujana, E., Kertiasih, N. K., & Al Insani, I. (2023). Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. *Prosiding Seminar ...*, 548–556. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3429>
- Suryo Wibowo, M. I., & Sulistya Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Syukri, F., & Arodhiskara, Y. (2024). MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DESA kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial . *Sedangkan sebagai lembaga komersial*. 3, 1–12.
- Tenda, C. A., Mangindaan, J. V., & Punuindoong, A. Y. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Christy. *Productivity*, 3(2), 2013–2015.
- Wulandari, G. P. M., & Lestari, N. P. N. E. (2024). Transformasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Era Digital. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 263–281. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3336>